



Briefing Subsidi Energi Indonesia

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

September 2015

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org

Sorotan

- Pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2016 di depan sidang DPR. Rancangan APBN untuk 2016 menjabarkan manfaat fiskal yang didapatkan dari reformasi subsidi BBM pada awal 2015.
- Meskipun penghematan anggaran dari subsidi solar dan bensin signifikan, subsidi LPG justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Rancangan APBN 2016 juga mengusulkan pemotongan subsidi listrik sebesar 41 persen dibandingkan tahun 2015, dan diperkirakan belanja total untuk subsidi listrik pada 2016 adalah sebesar Rp50 triliun.
- Meskipun ada indikasi yang jelas dari pemerintah pada awal 2015 untuk menyesuaikan harga domestik dengan harga internasional, kebijakan pemerintah terkait peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) cenderung tidak konsisten.
- Pada bulan Juli, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa pemerintah bertujuan membentuk dana minyak (oil fund) sebagai instrumen untuk mengelola fluktuasi di harga minyak internasional dan mendukung kegiatan hulu PT Pertamina.

Subsidi Energi dalam RAPBN 2016

Pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan sidang DPR tentang rancangan APBN 2016. Pidato Jokowi secara formal mencerminkan awal dari serangkaian negosiasi tentang anggaran negara yang lebih terperinci dengan para anggota DPR. Negosiasi APBN direncanakan akan berlangsung hingga 5 Oktober 2015 dan akan menghasilkan APBN 2016.

Total RAPBN 2016 adalah sebesar Rp2,1 triliun (US\$153 miliar), yang menunjukkan adanya kenaikan belanja pemerintah dari Rp1.984 triliun (US\$140 miliar) pada 2015 (Indo-Investments, 2015).

RAPBN tersebut mencakup alokasi subsidi energi sebesar Rp120,96 triliun (US\$8.4 miliar), yang terdiri dari Rp70,96 triliun (US\$5 miliar) untuk subsidi BBM dan LPG, dan Rp50 triliun (US\$3.52 miliar) untuk subsidi listrik (RAPBN 2016, 2015).

RAPBN 2016 juga menjabarkan manfaat fiskal yang didapatkan dari reformasi sektor BBM di awal 2015 serta komitmen pemerintah untuk tetap menghindari subsidi bensin dan solar (Reuters, 2015).

Sebagai perbandingan, penyediaan subsidi BBM dan LPG dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 adalah sebesar Rp239,99 triliun (USD16.9 miliar). Sementara itu, pada APBN-P 2015, subsidi BBM diperkirakan akan sebesar Rp64,67 triliun (US\$4.5 miliar). Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi subsidi BBM untuk 2015, subsidi pada RAPBN 2016 jauh lebih rendah dibandingkan sebelum reformasi dan diproyeksikan akan sebesar kurang lebih Rp70,96 triliun (US\$5 miliar). Namun demikian, perlu dicatat bahwa perkiraan APBN untuk subsidi biasanya di bawah belanja teraudit untuk subsidi BBM. Laporan audit untuk APBN 2015 diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan 2016.

Table 1. Indonesia Draft State Budget 2016 and Energy Subsidy Allocation

| Indikator | LKPP 2014 | APBN Perubahan 2015 | RAPBN 2016 |
|---|--|--|---|
| Indikator Makroekonomi | | | |
| Inflasi | 8.36% | 5.00% | 4.70% |
| Pertumbuhan | 5.06% | 5.70% | 5.50% |
| Produksi Minyak Mentah | 0.79 mbd | 0.82 mbd | 0.80 - 0.83 mbd |
| Produksi Gas Alam | 1.22 mboed | 1.22 mboed | 1.10-1.30 mboed |
| Nilai Tukar (Rp/USD) | 11,878 | 12,500 | 13,400 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia | US\$ 97/ bbl | US\$60/ bbl | US\$ 60/ bbl |
| Belanja Subsidi BBM | | | |
| Belanja Subsidi BBM (Bensin + Solar + Minyak Tanah + LPG) | IDR 239.9 triliun (US\$16.9 miliar) | IDR 64.67 triliun (US\$4.5 miliar) | IDR 70.96 triliun (US\$5 miliar) |
| Volume BBM Subsidi | 46 mkl | 17.9 mkl | 16.7 - 18.7 mkl |
| Volume LPG Subsidi | 5.1 mton | 5.8 mton | 6.5 - 6.65 mton |
| Belanja Subsidi Listrik | | | |
| Subsidi Listrik | Rp101.8 triliun (US\$7.19 miliar) | Rp73.15 triliun (US\$5.16 miliar) | Rp50 triliun (US\$3.52 miliar) |
| Fiscal Balance | | | |
| Pendapatan Negara | Rp 1,550.49 triliun (US\$ 109.53 miliar) | Rp 1,761.64 triliun (US\$ 124.45 miliar) | Rp 1,848.11 triliun (US\$ 130.5 miliar) |
| Belanja Negara (termasuk transfer ke daerah) | Rp 1,777.18 triliun (US\$ 125.5 miliar) | Rp 1,984.15 triliun (US\$ 158.73 miliar) | Rp 2,121.29 triliun (US\$ 140.172 miliar) |
| Defisit Anggaran | 1.91% | 1.90% | 2.10% |

Sumber: (LKPP 2014, 2015; RAPBN 2016, 2015)

Subsidi LPG Terus Meningkat

Meskipun penghematan APBN dari subsidi diesel dan bensin signifikan, subsidi LPG terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian subsidi LPG merupakan bagian kebijakan pemerintah untuk terus mendukung konsumsi gas domestik, khususnya untuk rumah tangga. Kebijakan ini adalah kelanjutan dari program "Zero Kero" yang diluncurkan pada 2007. Skema yang secara resmi dikenal sebagai "Program Konversi Minyak tanah ke LPG" ini bertujuan untuk mengganti konsumsi minyak tanah bersubsidi oleh rumah tangga menjadi LPG. Sejak diadopsi pada 2007, program "Zero Kero" telah menjadi salah satu penggerak utama kenaikan konsumsi LPG Indonesia yang konsisten di tingkat rumah tangga. Pada 2016, program "Zero Kero" akan diperluas ke Indonesia Timur, yaitu Sumbawa, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Pada 2017, program ini diharapkan akan menjangkau Papua (Bisnis.com, 2015).

Belanja pemerintah untuk subsidi LPG pada 2015 diharapkan akan mencapai Rp28 triliun (US\$1.97 miliar). Dengan proposal kenaikan volume LPG bersubsidi untuk 2016, belanja APBN untuk subsidi LPG diproyeksikan akan meningkat pada tahun tersebut. Akan tetapi, pada saat artikel ini ditulis, jumlah pastinya masih belum dapat diperkirakan (RAPBN 2016, 2015).

LPG untuk sektor rumah tangga di Indonesia disalurkan dalam kemasan 3kg dan 12kg. Secara resmi, subsidi diberikan secara universal untuk tabung 3kg sebagai cara untuk memberikan akses energi kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Akan tetapi, pada kenyataannya PT Pertamina mengklaim juga menjual tabung LPG 12kg di bawah harga keekonomiannya, dan karena itu, merugi sebesar Rp21,8 triliun (US\$1.5 miliar) antara 2008 hingga 2013. Untuk mengatasi kesenjangan ini, PT Pertamina mengadopsi skema penyesuaian harga untuk meningkatkan harga secara bertahap untuk LPG (non-subsidi) dengan kenaikan harga yang dijadwalkan akan dilakukan setiap enam bulan sekali sejak September 2014 (GSI, 2015). Sejak itu PT Pertamina telah melakukan penyesuaian harga dalam beberapa kesempatan. Pada Januari, harga LPG 12kg dinaikkan menjadi Rp134.700 (US\$9.5). Pada 19 Januari, harga diturunkan ke Rp129.000 (US\$9.1). Pada Maret, harga dinaikkan ke Rp134.000 (US\$9.4), dan yang terakhir pada April, harga LPG 12kg tercatat di level Rp142.000 (US\$10.03) (KOMPAS, 2015; JPNN, 2015; Tempo, 2015; CNN Indonesia, 2015).

Meningkatnya Risiko Kembalinya Subsidi BBM

Meskipun terdapat sinyal jelas dari pemerintah pada awal 2015 untuk menyesuaikan harga domestik dengan harga acuan internasional, kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM aktual juga cenderung

semakin tidak konsisten.

Segera setelah reformasi sektor BBM pada awal 2015, pemerintah bertindak cepat untuk menurunkan harga BBM pada dua kesempatan di bulan Januari, seiring dengan jatuhnya harga minyak internasional. Di saat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa pemerintah kemungkinan akan menyesuaikan harga secara dwi-mingguan (CNN Indonesia, 2015). Akan tetapi pada bulan Februari, pemerintah menunda penyesuaian dan mengumumkan akan merubah tenggatnya menjadi setiap bulan sekali (Republika, 2015). Pada tanggal 1 Maret, harga bensin naik sebesar Rp200 (USD0.01) per liter dan pada 28 Maret, harga bensin maupun diesel meningkat sebesar Rp500 (US\$0.03) per liter.

Kenaikan harga pada bulan Maret tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat dan DPR, dan pada bulan April, Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana melakukan penyesuaian harga BBM dengan jeda waktu yang lebih panjang (Sindonews, 2015). Pada akhir Mei 2015, ia juga mengumumkan bahwa penyesuaian harga BBM akan dilakukan setiap tiga bulan sekali (Antara, 2015) (CNN Indonesia, 2015). Terakhir, pada 1 Juni 2015, pemerintah mengumumkan tidak akan melakukan penyesuaian harga menjelang bulan Ramadhan, meskipun harga BBM Indonesia berada di tingkat yang sama selama tiga bulan sejak penyesuaian terakhir pada bulan Maret (Jawa Pos, 2015).

Kebijakan yang terus berubah dalam implementasi penetapan harga BBM yang baru telah menimbulkan kekhawatiran akan diterapkannya kembali sistem subsidi yang lama. Bahkan pada bulan Maret 2015, PT Pertamina memberikan sinyal kepada pemerintah tentang kerugian yang dialaminya karena formula penetapan harga masih belum diterapkan untuk menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Pada bulan Juli 2015, Menteri ESDM membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM di tengah turunnya harga internasional untuk menutup kerugian PT Pertamina selama beberapa bulan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa PT Pertamina telah merugi sebesar Rp12 triliun (The Jakarta Post, 2015) (The Jakarta Post, 2015; Reuters, 2015).

Perlu diketahui pula bahwa pada awal Agustus lalu, PT Pertamina baru menaikkan harga Pertamina untuk membantu menutup kerugian dari BBM bersubsidi – sementara distributor BBM swasta seperti Shell dan Total mulai menurunkan harga sejalan dengan turunnya harga minyak internasional (Jakarta Post, 2015).

Meskipun sebagian besar subsidi BBM telah dihapuskan dari APBN, PT Pertamina pada praktiknya harus

menanggung kerugian akibat keputusan pemerintah yang tidak menyesuaikan harga sesuai harga internasional, dan akibatnya, bayangan subsidi mulai kembali hadir. Sebagaimana diibaratkan seorang blogger, pemerintah “telah merampok Joe untuk membayar Jill” (The Jakarta Post, 2015). Situasi saat ini menunjukkan adanya kebutuhan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan penetapan harga BBM-nya antara lain dengan meningkatkan transparansi, pemantauan dan penegakan hukum. Pendekatan berbasis sewaktu-waktu dan tak terjadwal untuk menerapkan formula harga baru hanya akan lebih mempolitisasi penetapan harga diesel dan bensin, sehingga justru akan membuat pemerintah lebih kesulitan dalam menerapkan kenaikan harga minyak sesuai harga internasional kepada konsumen. Kebiasaan tersebut akan meningkatkan kemungkinan kembalinya permasalahan subsidi BBM.

Dana Minyak Indonesia (Indonesian Petroleum Fund)

Pada bulan Juli 2015, Menteri ESDM mengumumkan bahwa pemerintah berencana menyelenggarakan dana minyak (oil fund) sebagai instrumen untuk mengendalikan fluktuasi di harga minyak internasional dan mendukung kegiatan hulu PT Pertamina. Hingga saat ini mekanismenya masih belum jelas, namun menurutnya, dana minyak tersebut dirancang untuk mengumpulkan pendapatan ketika harga minyak internasional lebih rendah dari harga domestik, maupun sebaliknya, dan untuk membantu PT Pertamina menjaga kestabilan harga domestik ketika harga internasional sedang tinggi (Deal Street Asia, 2015). Dana minyak tidak disertakan dalam naskah RAPBN 2016, namun akan dibahas sebagai bagian dari revisi UU Migas yang akan dilakukan pada 2016 (CNN Indonesia, 2015). Pemerintah kini sedang mempertimbangkan berbagai sumber tambahan untuk pendanaan dana tersebut, termasuk APBN dan pendapatan pemerintah dari kegiatan produksi migas (Deal Street Asia, 2015).

Reformasi Subsidi Listrik 2016

RAPBN 2016 juga mencakup pemotongan subsidi listrik sebesar 41 persen dibandingkan 2015, dan diperkirakan belanja total subsidi listrik untuk 2016 adalah sebesar Rp50 triliun (US\$3.52 miliar). Sejak lama listrik di Indonesia dijual dengan harga bersubsidi untuk kelompok pengguna listrik kapasitas terendah, yakni 450 dan 900 volt ampere (VA). Selama ini subsidi listrik diberikan melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN). Namun demikian, saat ini jumlah pengguna yang menikmati tarif tersebut tercatat sekitar 44 juta rumah tangga, atau jauh lebih besar daripada jumlah rumah tangga yang diperkirakan masuk kategori miskin, yaitu sebesar 15,5 juta (TNP2K, 2014). Menurut Presiden

Jokowi, tujuan perubahannya adalah untuk memberikan subsidi listrik secara langsung kepada rumah tangga rentan (Bloomberg, 2015). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya kriteria rumah tangga rentan: apakah yang berada di bawah garis kemiskinan, atau yang mendekati garis kemiskinan? Lalu berapa nilai potongan harga yang harus diterapkan? Detil mengenai mekanisme kompensasi ini masih harus ditunggu, dan pernyataan-pernyataan awal pemerintah mengisyaratkan bahwa penghematan dari reformasi listrik akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial (Rambu Energy, 2015).

References

- Antara. (2015, May 31). Pemerintah akan sesuaikan harga BBM tiap tiga bulan. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/499037/pemerintah-akan-sesuaikan-harga-bbm-tiap-tiga-bulan>
- Bisnis.com. (2015, August 18). Tahun Depan, Konversi Bahan Bakar Rambah Indonesia Timur. Retrieved from <http://industri.bisnis.com/read/20150818/44/463396/tahun-depan-konversi-bahan-bakar-rambah-indonesia-timur>
- Bloomberg. (2015). Retrieved from <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-16/widodo-to-switch-off-middle-class-power-subsidy-in-budget-reform>
- BPS. (n.d.). Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2013. Retrieved from <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1026>
- BPS. (n.d.). Value of Oil and Gas Exports and Imports (million US\$), 1999-2013. Retrieved from <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1004>
- CNN Indonesia. (2015, April 4). DPR: Sesuai Kesepakatan, Penyesuaian Harga BBM Sekali Sebulan. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150404120810-85-44123/dpr-sesuai-kesepakatan-penyesuaian-harga-bbm-sekali-sebulan/>
- CNN Indonesia. (2015, July 23). Kementerian ESDM: Petroleum Fund Perlu Segera Dibentuk. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150723083545-85-67696/kementerian-esdm-petroleum-fund-perlu-segera-dibentuk/>
- CNN Indonesia. (2015, August 14). Pembiayaan Dana Petroleum Fund Mengerucut ke Dua Pos. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150814144944-85-72216/pembiayaan-dana-petroleum-fund-mengerucut-ke-dua-pos/>
- CNN Indonesia. (2015, May 31). Pemerintah Putuskan Penyesuaian Harga BBM Per Tiga Bulan. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150531112431-85-56783/pemerintah-putuskan-penyesuaian-harga-bbm-per-tiga-bulan/>
- Deal Street Asia. (2015). Retrieved from <http://www.dealstreetasia.com/stories/indonesia-to-create-petroleum-fund-for-financing-pertaminas-upstream-downstream-projects-9604/>
- detik.com. (2015, January 6). Daftar Terbaru Harga Elpiji 12 Kg di Seluruh Indonesia. Retrieved from <http://finance.detik.com/read/2015/01/06/100505/2794994/1034/daftar-terbaru-harga-elpiji-12-kg-di-seluruh-indonesia>
- detik.com. (2015, March 3). Indonesia Impor 67% Kebutuhan Elpiji. Retrieved from <http://finance.detik.com/read/2015/03/03/075853/2847576/1034/indonesia-impor-67-kebutuhan-elpiji>
- DPR RI. (2015). Jadwal Acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-2e7d833994c6f26486bd304c10b60f11.pdf>
- GSI. (2015). Retrieved from http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_reviewi2v1_english.pdf
- IISD-GSI. (2015, June). Indonesia Energy Subsidy Briefing. Retrieved from http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_June2015_eng.pdf
- Indo-Investments. (2015). Retrieved from <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/state-budget-2016-indonesia-budget-deficit-at-1.9-2.0-of-gdp/item5712>
- Jakarta Post. (2015). Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/08/pertamina-increases-prices-non-subsidized-fuels.html>
- Jawa Pos. (2015, June 1). Jelang Ramadan, Harga Premium-Solar Tetap. Retrieved from <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/18174/Jelang-Ramadan-Harga-Premium-Solar-Tetap>
- JPNN. (2015, April 2). Diam-Diam, Pertamina Resmi Naikkan Harga Elpiji 12 Kg. Retrieved from <http://jpnn.com/>

read/2015/04/02/295677/Diam-Diam,-Pertamina-Resmi-Naikkan-Harga-Elpiji-12-Kg

Katadata. (2015, July 22). Government Reviews the Petroleum Fund Plan. Retrieved from <http://katadata.co.id/en/node/5709>

Kompas. (2015, May 15). Harga BBM Batal Naik karena Permintaan Pemerintah. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/15/125908426/Harga.BBM.Batal.Naik.karena.Permintaan.Pemerintah>

Kompas. (2015, January 8). Harga BBM jenis Premium akan "Disesuaikan" 2 Minggu Sekali. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/08/143944826/Harga.BBM.jenis.Premium.akan.Disesuaikan.2.Minggu.Sekali>

KOMPAS. (2015, January 3). Harga Elpiji 12 Kg Kembali Naik. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/03/150407826/Harga.Elpiji.12.Kg.Kembali.Naik>

Kompas. (2015, May 15). Ini Penjelasan Pemerintah Minta Pertamina Tunda Kenaikan Harga BBM. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/15/155139826/Ini.Penjelasan.Pemerintah.Minta.Pertamina.Menunda.Kenaikan.Harga.BBM>

KOMPAS. (2015, April 2). Naik Lagi, Harga Elpiji 12 Kg Jadi Rp 142.000 Per Tabung. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/02/083507126/Naik.Lagi.Harga.Elpiji.12.Kg.Jadi.Rp.142.000.Per.Tabung>

KOMPAS. (2015, March 1). Pertamina: Harga Elpiji 12 Kg Naik Rp 5.000 Per Tabung. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/01/145242526/Pertamina.Harga.Elpiji.12.Kg.Naik.Rp.5.000.Per.Tabung>

Liputan6. (2015, July 22). Subsidi Listrik yang Tak Tepat Sasaran Capai 25%. Retrieved from <http://bisnis.liputan6.com/read/2277211/subsidi-listrik-yang-tak-tepat-sasaran-capai-25>

Merdeka. (2015, January 15). Mulai Februari 2015, harga BBM naik turun tiap dua minggu sekali. Retrieved from <http://www.merdeka.com/tag/b/bbm-naik/mulai-februari-2015-harga-bbm-naik-turun-tiap-dua-minggu-sekali.html>

MetroTVNews. (2015, July 15). Pemerintah Bukan Cabut Subsidi Listrik, Tapi.. Retrieved from <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/07/15/147881/pemerintah-bukan-cabut-subsidi-listrik-tapi>

Rambu Energy. (2015). Retrieved from <http://www.rambuenergy.com/2015/07/indonesia-govt-to-slash-subsidy-by-nearly-half-in-2016-draft-state-budget/>

Republika. (2015, March 2). DPR: Bisa Saja April BBM Naik Kembali, Tergantung Harga Minyak Dunia. Retrieved from <http://www.rmol.co/read/2015/03/02/193758/DPR:-Bisa-Saja-April-BBM-Naik-Kembali,-Tergantung-Harga-Minyak-Dunia->

Republika. (2015, August 21). Penyesuaian Harga LPG 12 Kg Tumbuhkan Kompetisi. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/21/ntfr4i254-penyesuaian-harga-lpg-12-kg-tumbuhkan-kompetisi>

Reuters. (2015, July 22). Hit by subsidy losses, Indonesia's Pertamina may not cut pump prices. Retrieved from <http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL3N10227920150722>

Sindonews. (2015, April 8). Pemerintah Kaji Ulang Mekanisme Penyesuaian Harga BBM. Retrieved from <http://ekbis.sindonews.com/read/986793/34/pemerintah-kaji-ulang-mekanisme-penyesuaian-harga-bbm-1428483891>

Sindonews. (2015, August 2). Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM. Retrieved from <http://ekbis.sindonews.com/read/1028554/34/pemerintah-tunda-kenaikan-harga-bbm-1438504343>

State Budget 2014 Audited (2015).

State Budget 2016 - Proposal (2015).

Tempo. (2015, March 1). Pertamina: Harga Elpiji 12 Kilogram Naik Rp 5.000 per Tabung . Retrieved from <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/01/090646151/pertamina-harga-elpiji-12-kilogram-naik-rp-5-000-per-tabung>

Tempo. (2015, July 17). Perubahan Mekanisme Subsidi Listrik, Perbaiki Neraca PLN. Retrieved from <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/17/090684499/perubahan-mekanisme-subsidi-listrik-perbaiki-neraca-pln>

The Jakarta Post. (2015, July 25). Govt won't cut fuel prices even as crude plunges. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/25/govt-won-t-cut-fuel-prices-even-crude-plunges.html>

The Jakarta Post. (2015, August 18). Jokowi toying with price controls: How far will he go? Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/18/jokowi-toying-with-price-controls-how-long-can-it-go.html>

The Jakarta Post. (2015, July 15). Palm oil fund body eyes Rp 4.5 trillion in 2015. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/15/palm-oil-fund-body-eyes-rp-45-trillion-2015.html>

The Jakarta Post. (2015, June 6). Rising LPG subsidies could pressure state budget: LIPI . Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/06/rising-lpg-subsidies-could-pressure-state-budget-lipi.html>

TNP2K. (2014). Retrieved from <http://www.comcec.org/UserFiles/File/WorkingGroups/Poverty4/Presentations/Indonesia.pdf>

World Bank. (2012). Targeting Poor and Vulnerable Households in Indonesia. Washington: World Bank Group.

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development
Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org

About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development
Global Subsidies Initiative
International Environment House 2
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine,
Geneva, Switzerland

cbeaton@iisd.org
lucky.lontoh@iisd.org

Tel: +41 22 917-8373
Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>